



Dinamika Relasi Negara dan *Civil Society* dalam Pembangunan Perdamaian di Ambon 2002-2022

Fadly Fahry S. Wally¹, Meidi Kosandi²

Abstract

This article analyzes the dynamics of the relationship between the state and civil society in the peace-building process in post-conflict Ambon from 1999 to 2002. Using J.P. Lederach's conflict transformation theory framework and Pierre Bourdieu's social capital concept, this study explores the evolution of the relationship between the two actors during the period from 2002 to 2022. A qualitative research method with a case study approach is used to analyze the processes of reconciliation, rehabilitation, and social reconstruction. The findings show that the state-civil society relations have transformed from a hierarchical-centralist pattern to a collaborative-participative one. Civil society acts as a bridge in building trust among groups, while the state provides legal frameworks and structural support. The social capital accumulated through interfaith dialogues, joint economic programs, and cultural initiatives has proven effective in strengthening social cohesion and preventing escalation of horizontal conflicts in Ambon.

Keywords

Power Transformation; State; Civil Society; Reconciliation

Abstrak

Artikel ini menganalisis dinamika relasi antara negara dan civil society dalam proses pembangunan perdamaian di Ambon pasca-konflik komunal tahun 1999-2002. Menggunakan kerangka teori transformasi konflik J.P. Lederach dan konsep modal sosial Pierre Bourdieu, studi ini mengeksplorasi evolusi hubungan kedua aktor selama periode 2002-2022. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis proses rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi sosial. Temuan menunjukkan bahwa relasi negara-civil society mengalami transformasi dari pola hierarkis-sentralistik menuju kolaboratif-partisipatif. Civil society berperan sebagai jembatan dalam membangun kepercayaan antarkelompok, sementara negara menyediakan kerangka legal dan dukungan struktural. Modal sosial yang terakumulasi melalui dialog antar agama, program ekonomi bersama, dan inisiatif budaya terbukti efektif memperkuat kohesi sosial dan mencegah eskalasi konflik horizontal di Ambon.

¹ Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

² Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Corresponding Author:

Fadly Fahry S. Wally, Universitas Indonesia, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia ✉ chairilmuda70@gmail.com



Kata Kunci

Transformasi Kekuasaan; Negara; Civil Society; Rekonsiliasi

Article history

Received 20 May 2025

Revised 26 June 2025

Accepted 28 June 2025

Published 30 June 2025

Cite this article

Wally, F.F.S., & Kosandi, M. (2025). Dinamika Relasi Negara dan Civil Society dalam Pembangunan Perdamaian di Ambon 2002-2022. *Jurnal Politik Profetik*, 13(1), 93-113.
<https://doi.org/10.24252/profetik.v13i1a5>

Pendahuluan

Studi tentang pembangunan perdamaian (*peacebuilding*) selama ini cenderung melihat negara dan *civil society* dalam dikotomi yang kaku, di mana negara sering digambarkan sebagai aktor dominan dengan pendekatan *top-down* sementara *civil society* ditempatkan sebagai representasi pendekatan *bottom-up* yang lebih memahami kebutuhan masyarakat akar rumput. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan kompleksitas yang lebih tinggi, di mana batas-batas antara kedua entitas tersebut seringkali kabur dan tumpang tindih. Kontestasi kekuasaan yang terjadi tidak selalu bersifat konfrontatif, melainkan juga dapat berbentuk negosiasi, adaptasi, bahkan hibridisasi yang menciptakan ruang-ruang baru dalam pembangunan perdamaian.

Konteks Ambon menawarkan laboratorium sosial yang unik untuk mengkaji dinamika relasi negara dan *civil society* dalam pembangunan perdamaian. Sebagai daerah yang pernah mengalami konflik komunal dengan skala kerusakan yang masif, Ambon telah menjalani berbagai inisiatif rekonsiliasi yang melibatkan intervensi negara maupun peran aktif *civil society*. Selama periode 2002-2022, pendulum kekuasaan dalam pembangunan perdamaian di Ambon telah bergerak dinamis, menciptakan konstelasi relasi yang terus berubah seiring dengan transformasi sosial-politik yang terjadi di tingkat lokal maupun nasional.

Permasalahan mendasar yang menjadi akar kontestasi kekuasaan antara negara dan *civil society* dalam rekonsiliasi pasca konflik di Ambon terletak pada perbedaan paradigma dalam memahami dan mengelola proses perdamaian. Negara, dengan latar belakang kepentingan menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, cenderung menerapkan pendekatan rekonsiliasi yang bersifat normatif dan prosedural dengan fokus pada pembangunan fisik dan pemulihan ekonomi. Pendekatan ini sering mengabaikan dimensi sosio-kultural dan keadilan transisional yang menjadi tuntutan masyarakat korban konflik. Di sisi lain, *civil society* yang tumbuh dari pengalaman langsung menghadapi konflik lebih menekankan pendekatan transformatif yang mengutamakan penyembuhan trauma, rekonstruksi sosial, dan penguatan identitas kultural sebagai basis perdamaian. Perbedaan fundamental ini menciptakan ketegangan struktural yang mempengaruhi arah dan implementasi program-program rekonsiliasi di lapangan.

Lebih jauh, dinamika relasi antara negara dan *civil society* dalam proses rekonsiliasi di Ambon diperumit oleh fragmentasi internal di kedua belah pihak. Di tingkat negara, terjadi disharmoni antara pemerintah pusat dan daerah dalam merespons kebutuhan rekonsiliasi, serta ego sektoral antar lembaga yang menghambat koordinasi program-program perdamaian. Sementara itu, *civil society* sendiri juga mengalami polarisasi berdasarkan afiliasi identitas, kepentingan donor, dan ideologi gerakan yang membuat suara mereka sebagai penyeimbang kekuasaan negara tidak selalu koheren. Ketidakstabilan politik dan ekonomi pasca reformasi juga menjadi faktor yang memperkompleks relasi kekuasaan ini, di mana keterbatasan sumber daya dan kesempatan ekonomi sering menciptakan arena kompetisi baru dalam pengelolaan program-program rekonsiliasi.

Ketegangan antara narasi “keamanan nasional” yang diusung negara dan tuntutan “keadilan lokal” yang diperjuangkan *civil society* juga menjadi elemen penting yang mempengaruhi dinamika kontestasi kekuasaan dalam rekonsiliasi pasca konflik di Ambon. Negara, dengan orientasi pada pemulihan citra Indonesia di mata internasional pasca konflik, cenderung mengedepankan narasi “keberhasilan perdamaian” dan “harmonisasi sosial” yang terkadang mengaburkan realitas ketimpangan dan ketidakadilan yang masih dirasakan oleh korban konflik. Sebaliknya, *civil society* dengan orientasi pada pemulihan hak-hak korban dan transformasi konflik, lebih menekankan pentingnya pengakuan atas kebenaran historis, keadilan restoratif, dan pencegahan kekerasan berulang melalui reformasi struktural. Pertarungan narasi ini tidak hanya mempengaruhi alokasi sumber daya untuk program-program rekonsiliasi, tetapi juga menentukan siapa yang memiliki legitimasi untuk mendefinisikan makna “perdamaian” dan “rekonsiliasi” di ruang publik Ambon.

Artikel ini berupaya menganalisis dinamika relasi kekuasaan yang terjadi dalam rekonsiliasi pasca konflik di Ambon selama dua dekade terakhir (2002-2022). Dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan teori pembangunan perdamaian, penelitian ini menelusuri bagaimana negara dan *civil society* saling berinteraksi, berkontestasi, dan bernegosiasi dalam membentuk wacana dan praktik rekonsiliasi. Lebih jauh, artikel ini juga mengeksplorasi bagaimana dinamika relasi tersebut berimplikasi pada keberhasilan maupun hambatan dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di Ambon.

Dengan menganalisis dinamika kekuasaan dalam rekonsiliasi pasca konflik di Ambon, penelitian ini tidak hanya memperkaya pemahaman teoretis tentang relasi negara dan *civil society* dalam pembangunan perdamaian, tetapi juga menawarkan perspektif praktis bagi pengembangan kebijakan rekonsiliasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di daerah-daerah pasca konflik lainnya di Indonesia maupun konteks global.

Dinamika kekuasaan antara negara dan *civil society* dalam konteks rekonsiliasi pasca konflik telah menjadi fokus penelitian yang semakin mendapat perhatian dalam literatur akademik internasional. Penelitian-penelitian terkini menunjukkan bahwa relasi antara kedua aktor ini bersifat kompleks dan sering kali menghadirkan

tantangan dalam proses transformasi konflik. Sebagaimana dikemukakan dalam konteks negara-negara yang baru keluar dari konflik atau kediktatoran, struktur sosial dan relasi kekuasaan yang tidak setara cenderung bertahan lama bahkan setelah konflik atau rezim otoriter berakhir (Parto, 2018). Hal ini mengindikasikan bahwa transformasi relasi kekuasaan memerlukan upaya yang berkelanjutan dan tidak dapat diselesaikan secara instan melalui perubahan politik formal semata.

Partisipasi *civil society* dalam proses rekonsiliasi menunjukkan pola yang beragam tergantung pada konteks politik dan tingkat keterbukaan ruang sipil yang disediakan oleh negara. Penelitian mengenai peran *civil society* dalam negosiasi perdamaian di Amerika Tengah mengungkapkan bahwa meskipun komunitas internasional mendorong partisipasi *civil society* sejak tahap negosiasi perdamaian, efektivitas keterlibatan mereka sangat bergantung pada struktur politik yang ada (Nilsson, 2018). Ibrahim Natil (2021) menyoroti bagaimana perempuan muda Palestina bekerja melalui organisasi *civil society* lokal untuk meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan komunitas serta diri mereka sendiri. *Civil society* memainkan peran kunci dalam implementasi keadilan transisional dan proses rekonsiliasi nasional (Alici, 2024), baik dalam konteks konflik yang sedang berlangsung maupun dalam upaya menghormati korban konflik politik melalui komisi-komisi rekonsiliasi (van Munster, M., & van Wijk, 2025).

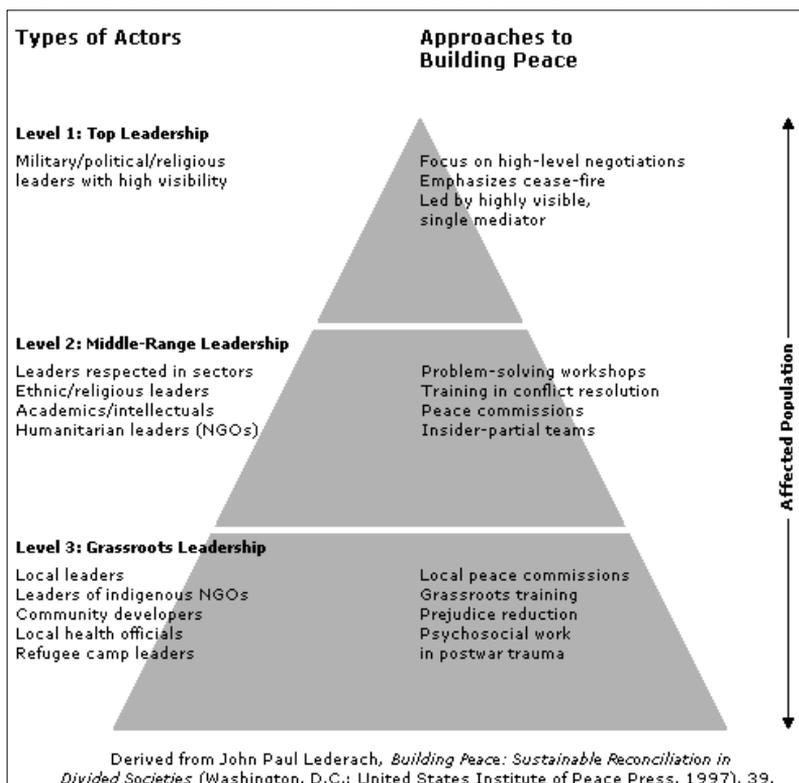
Civil society memainkan peran sentral dalam proses rekonsiliasi pasca-konflik melalui berbagai pendekatan transformatif dan pemberdayaan masyarakat. Organisasi *civil society* memainkan peran kunci dalam pemantauan, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelesaian konflik agraria (Sihite et al, 2023), yang menunjukkan pentingnya keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam memfasilitasi dialog konstruktif antar kelompok yang berkonflik. Organisasi *civil society* juga berperan dalam menghadapi narasi sejarah konflik sebagai jalan untuk mencapai rekonsiliasi antar kelompok, dengan fokus mengubah persepsi dan membangun kepercayaan kembali antara pihak-pihak yang pernah berkonflik (Shnabel & Ullrich, 2017). Sementara itu, studi Trihartono & Viartasiwi (2018) menunjukkan bahwa *civil society* telah berada di garis depan dalam menjaga perdamaian dengan bekerja untuk memutus siklus kekerasan di masyarakat pasca-konflik di Poso.

Dalam konteks manajemen organisasi *civil society* di lingkungan pasca konflik yang tidak stabil, penelitian terbaru menunjukkan bahwa dinamika manajemen internal *civil society* dan penciptaan nilai sosial menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama dalam kondisi krisis seperti pandemi COVID-19 (Arslan, 2022). Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya memahami bagaimana *civil society* beradaptasi dengan perubahan konteks politik dan sosial untuk mempertahankan peran mereka dalam proses rekonsiliasi. Sementara itu, studi tentang dampak konflik bersenjata terhadap kohesi sosial menekankan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana konflik mempengaruhi struktur sosial masyarakat menjadi kunci untuk merancang strategi rekonsiliasi yang efektif (Fiedler, 2023). Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa relasi kekuasaan antara negara dan *civil society* dalam rekonsiliasi pasca konflik tidak hanya melibatkan aspek politik formal, tetapi

juga dimensi sosial-budaya yang lebih mendalam dan memerlukan pendekatan yang holistik dan adaptif.

Artikel ini ditulis menggunakan kerangka teori *transformative peacebuilding* yang dikembangkan oleh John P. Lederach (1997, 2014) menawarkan kerangka komprehensif untuk memahami rekonsiliasi pasca konflik sebagai proses transformasi yang mendalam dan berkelanjutan. Berbeda dengan pendekatan resolusi konflik konvensional yang berfokus pada penyelesaian masalah jangka pendek, Lederach memandang pembangunan perdamaian sebagai transformasi hubungan, pola budaya, dan struktur yang memungkinkan kekerasan terjadi dan berkelanjutan. Lederach (1997) mengusulkan model piramida aktor perdamaian yang terdiri dari tiga tingkatan: pemimpin tingkat atas (*top leadership*), pemimpin tingkat menengah (*middle-range leadership*), dan pemimpin akar rumput (*grassroots leadership*). Model ini menekankan pentingnya pendekatan multi-level yang menghubungkan inisiatif perdamaian di berbagai tingkatan masyarakat.

Gambar 1. Piramida Aktor dan Pendekatan Perdamaian John P. Lederach



Sumber: Thania Paffenholz, 2014.

Lederach (2014) lebih lanjut menjelaskan bahwa transformasi konflik berupaya untuk menciptakan perubahan konstruktif melalui konflik dengan mengidentifikasi dan mengatasi pola-pola hubungan yang merusak sambil membangun struktur

yang mempromosikan perdamaian. Dalam konteks ini, rekonsiliasi dipahami bukan sekadar sebagai upaya untuk mengembalikan relasi ke kondisi pra-konflik, melainkan sebagai proses membangun hubungan baru yang lebih adil dan berkelanjutan. Lederach (2005) mengembangkan konsep *moral imagination* sebagai kapasitas untuk membayangkan dan mengembangkan respons terhadap konflik yang melampaui kerangka kekerasan yang dominan. Konsep ini menekankan pentingnya kreativitas, pengambilan risiko, dan kemampuan untuk mengenali kemanusiaan bersama bahkan dalam situasi konflik yang paling memecah belah.

Aspek penting lain dari teori Lederach adalah penekanan pada proses jangka panjang dan pentingnya membangun infrastruktur perdamaian yang berkelanjutan. Lederach berpendapat bahwa pembangunan perdamaian harus melibatkan perubahan pada empat dimensi: personal (perubahan kognitif, emosional, dan perilaku individu), relasional (pola komunikasi dan interaksi antar kelompok), struktural (transformasi sistem dan institusi yang menyebabkan dan memelihara konflik), dan kultural (perubahan norma-norma kolektif dan praktik-praktik yang melegitimasi kekerasan). Kerangka ini membantu menganalisis bagaimana intervensi rekonsiliasi oleh negara dan *civil society* berkontribusi pada—atau menghambat—transformasi dalam keempat dimensi tersebut selama dua dekade pasca konflik.

Sementara itu, pemikiran Pierre Bourdieu (1977) tentang kontestasi kekuasaan menawarkan lensa teoretis yang kaya untuk menganalisis dinamika relasi negara dan *civil society* dalam rekonsiliasi pasca konflik. Konsep utama dalam teori Bourdieu yang relevan untuk analisis ini mencakup habitus, *field* (arena), dan *capital* (modal). Bourdieu mendefinisikan habitus sebagai sistem disposisi yang bertahan lama dan dapat ditransfer, yang terbentuk melalui pengalaman dan menginformasikan persepsi serta praktik sosial individu dan kelompok. Dalam konteks rekonsiliasi di Ambon, konsep ini membantu memahami bagaimana pengalaman konflik membentuk disposisi dan orientasi aktor negara dan *civil society* terhadap proses perdamaian.

Field atau arena, menurut Bourdieu (1984), adalah ruang sosial terstruktur dengan logika spesifik di mana aktor-aktor bersaing untuk posisi menggunakan berbagai bentuk modal yang mereka miliki. Modal ini dapat berbentuk ekonomi (sumber daya material), sosial (jaringan dan koneksi), kultural (pengetahuan dan keahlian), dan simbolik (prestise dan legitimasi). Rekonsiliasi pasca konflik dapat dipahami sebagai arena di mana negara dan *civil society* berkontestasi dan bernegosiasi, dengan masing-masing aktor memanfaatkan modal yang berbeda untuk mendefinisikan dan memengaruhi arah proses rekonsiliasi. Di Ambon, negara cenderung memanfaatkan modal ekonomi (sumber anggaran) dan simbolik (otoritas formal), sementara *civil society* mengandalkan modal sosial (jaringan komunitas) dan kultural (pemahaman konteks lokal).

Bourdieu (1991) juga mengembangkan konsep *symbolic power* (kekuasaan simbolik) yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengkonstruksi realitas dan menetapkan kategori pemahaman yang diterima secara alami oleh masyarakat. Dalam rekonsiliasi pasca konflik, kekuasaan simbolik berperan penting dalam

mendefinisikan narasi tentang konflik, kebenaran, dan perdamaian. Narasi “keamanan nasional” yang diusung negara dan tuntutan “keadilan lokal” yang diperjuangkan *civil society* di Ambon mencerminkan pertarungan kekuasaan simbolik dalam mendefinisikan makna rekonsiliasi. Konsep *doxa* (Bourdieu, 1977), pemahaman yang diterima begitu saja tentang realitas sosial, juga membantu menganalisis bagaimana narasi dominan tentang rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian dapat menaturalisasi kepentingan tertentu sambil memarjinalkan perspektif alternatif.

Mengintegrasikan teori Lederach dengan teori Bourdieu menciptakan kerangka analitis yang kuat untuk memahami dinamika relasi negara dan *civil society* dalam rekonsiliasi pasca konflik di Ambon. Model piramida aktor Lederach membantu mengidentifikasi aktor-aktor kunci dan inisiatif perdamaian di berbagai tingkatan, sementara konsep *field*, *capital*, dan *symbolic power* dari Bourdieu memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana aktor-aktor tersebut berkontestasi dan bernegosiasi dalam mendefinisikan dan mengimplementasikan proses rekonsiliasi. Dimensi transformasi Lederach (personal, relasional, struktural, dan kultural) dapat dianalisis melalui lensa kontestasi kekuasaan Bourdieu untuk memahami bagaimana relasi kekuasaan memengaruhi proses transformasi dalam masing-masing dimensi.

Kerangka terintegrasi ini memungkinkan analisis yang lebih bernuansa tentang dinamika rekonsiliasi di Ambon selama dua dekade terakhir. Dikotomi negara dan *civil society* yang sering digunakan dalam kajian pembangunan perdamaian dapat dipahami ulang sebagai arena (*field*) yang kompleks di mana berbagai aktor dengan modal dan habitus yang berbeda berkontestasi dan bernegosiasi. Pendekatan ini juga memungkinkan pemahaman yang lebih dinamis tentang bagaimana relasi kekuasaan antara negara dan *civil society* bertransformasi seiring waktu, dipengaruhi oleh perubahan dalam distribusi modal dan evolusi arena politik lokal dan nasional. Dengan demikian, kerangka teoretis ini tidak hanya membantu menjelaskan kompleksitas rekonsiliasi pasca-konflik di Ambon, tetapi juga memberikan alat analitis untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam upaya membangun perdamaian yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Metode

Artikel ini dipaparkan menggunakan metode kualitatif yang dilakukan terhadap subjek penelitian untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang suatu fenomena atau proses. Menurut Cresswell (2014), metode ini guna membentuk pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif, seperti hal-hal yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah yang bertujuan untuk membangun teori dan pola pengetahuan tertentu atau berdasarkan orientasi terhadap isu perubahan dan politik. Melalui metode kualitatif, konteks sosial, politik, dan ekonomi dipahami sebagai sesuatu yang dinamis dan senantiasa beru-

bah berdasar relasi dan interaksi yang terbangun antara aktor-aktor di dalam struktur masyarakat.

Lokasi penelitian yaitu Ambon yang menjadi tempat lokasi konflik dan rekonsiliasi konflik yang melibatkan dinamika kekuasaan oleh negara dan *civil society* selama periode pasca-konflik yang ditandai Perjanjian Damai Malino II. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu: *Pertama*, data primer. Creswell dan Poth (2018) menyarankan penggunaan wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang pengalaman dan perspektif aktor-aktor kunci. Informan yang kami wawancarai yakni: 1) Dr. Abidin Wakano, akademisi IAIN Ambon dan Direktur Lembaga Antar Iman Maluku (LAIM); 2) Ibu Oca, aktivis perdamaian perempuan (Gerakan Perempuan Peduli/GPP); 3) IL, pemuda Batumerah; 4) Iskandar Slamet, mantan kombatan perang anak dan aktivis perdamaian; 5) Prof. Dr. John Ruhlessin, akademisi UKIM Ambon dan tokoh perdamaian.

Kedua, data sekunder yang diperlukan dalam penelitian guna melengkapi informasi yang diperoleh dari sumber data primer. Bowen (2009) menyarankan analisis dokumen sebagai metode untuk memperkaya data. Dokumen yang dapat dianalisis termasuk laporan pemerintah, publikasi NGO, artikel media, dan arsip sejarah terkait konflik dan rekonsiliasi di Ambon.

Pembahasan

Transformasi Modal Sosial dalam Rekonstruksi Hubungan Negara-Civil Society Pasca Konflik

Pasca berakhirnya konflik komunal yang menghancurkan tatanan sosial Ambon, rekonstruksi hubungan antara negara dan *civil society* menjadi tantangan fundamental dalam upaya pembangunan perdamaian. Kerusakan modal sosial yang terjadi tidak hanya menghancurkan jaringan interpersonal, tetapi juga menciptakan jurang kepercayaan yang mendalam antara masyarakat dengan institusi negara. Dalam konteks ini, transformasi modal sosial sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Pierre Bourdieu menjadi kunci untuk memahami bagaimana proses rekonstruksi ini berlangsung. Modal sosial, yang terdiri dari jaringan hubungan, norma kepercayaan, dan solidaritas kolektif, harus dibangun kembali melalui upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor di tingkat lokal.

Salah satu aspek yang paling mencolok dalam proses rekonstruksi ini adalah peran sentral yang dimainkan oleh *middle-range leadership*, sebuah konsep yang dikembangkan oleh Lederach dalam teori transformasi konfliknya. Tokoh-tokoh agama, pemimpin adat, dan aktivis masyarakat sipil berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kebijakan makro negara dengan kebutuhan konkret masyarakat *grassroots*. Abidin Wakano, seorang akademisi dan tokoh agama yang aktif dalam dialog antar agama, menjelaskan bagaimana proses rekonstruksi kepercayaan ini berlangsung: “Kami harus mulai dari hal-hal yang sangat kecil. Ketika pemerintah membuat program bantuan, kami pastikan tidak ada diskriminasi. Kami duduk bersama dengan aparat, bukan sebagai lawan, tetapi sebagai rekan yang

sama-sama ingin membangun kembali Ambon.” Pernyataan ini mencerminkan bagaimana modal sosial yang rusak secara bertahap direkonstruksi melalui praktik-praktik kolaboratif yang konkret.

Transformasi modal sosial dalam konteks Ambon tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik lokal yang lebih luas. Negara, melalui berbagai program rekonstruksi pasca konflik, berupaya melegitimasi kembali kehadirannya di tengah masyarakat yang telah kehilangan kepercayaan terhadap institusi formal. Namun, proses ini tidak berlangsung dalam ruang hampa. *Civil society*, yang telah mengalami traumatisasi kolektif, memiliki agensi untuk menegosiasikan syarat-syarat keterlibatan mereka dalam proses rekonstruksi. Konsep *field* yang dikembangkan Bourdieu menjadi relevan di sini, karena menunjukkan bagaimana berbagai aktor bersaing dan berkolaborasi dalam ruang sosial yang sama untuk mendefinisikan ulang aturan-aturan bermain dalam tatanan sosial yang baru.

Rekonstruksi modal sosial juga termanifestasi dalam revitalisasi praktik-praktik gotong royong yang sempat terputus akibat konflik. Oca, seorang aktivis perempuan yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat, menceritakan pengalamannya: “Dulu, kami takut untuk berkumpul dengan tetangga yang berbeda agama. Tapi ketika pemerintah membuat program pembangunan berbasis masyarakat, kami dipaksa untuk duduk bersama. Awalnya canggung, tapi perlahan kami mulai saling mengenal lagi. Sekarang, gotong royong sudah berjalan normal seperti dulu.” Narasi ini menunjukkan bagaimana program-program negara dapat berfungsi sebagai katalis untuk reaktivasi modal sosial yang dorman, meskipun prosesnya memerlukan waktu dan kesabaran yang tidak sedikit.

Dalam perspektif Lederach, pembangunan perdamaian yang berkelanjutan memerlukan transformasi hubungan yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural. Hal ini tercermin dalam bagaimana negara dan *civil society* di Ambon secara bertahap mengembangkan bahasa dan praktik baru dalam berinteraksi. Dialog tidak lagi dipahami sebagai proses formal yang kaku, tetapi sebagai praktik sosial yang hidup dan dinamis. Abidin Wakano, menjelaskan: “Pemerintah sekarang lebih sering bertanya kepada kami sebelum membuat keputusan. Ini bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka sudah mengerti bahwa keputusan yang baik harus melibatkan semua pihak. Kami juga belajar untuk tidak selalu menuntut, tetapi juga memberikan kontribusi positif.”

Proses transformasi modal sosial ini juga ditandai dengan munculnya ruang-ruang partisipasi baru yang memungkinkan *civil society* untuk terlibat secara lebih substantif dalam proses pengambilan keputusan. Forum-forum dialog, komite-komite pembangunan, dan lembaga-lembaga konsultasi yang dibentuk pasca-konflik bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme formal, tetapi juga sebagai arena dimana modal sosial baru dapat terbentuk dan terakumulasi. Dalam konteks ini, konsep Bourdieu tentang konversi modal menjadi sangat relevan, karena menunjukkan bagaimana modal sosial yang terbentuk dalam ruang-ruang informal dapat dikonversi menjadi modal politik yang lebih formal.

Namun, proses rekonstruksi modal sosial ini tidak berlangsung tanpa tantangan. Ketidakpercayaan yang mengakar, trauma kolektif yang belum sepenuhnya pulih, dan kepentingan politik yang beragam seringkali menghambat upaya-upaya kolaboratif. John Ruhlessin, akademisi dan tokoh perdamaian Ambon, mengakui kompleksitas ini: “Tidak semua orang siap untuk berdamai. Ada kelompok yang masih curiga dengan pemerintah, ada juga yang merasa dirugikan oleh program rekonstruksi. Tugas kami adalah terus membangun jembatan, meskipun prosesnya lambat dan sulit.” Pernyataan ini mencerminkan bagaimana transformasi modal sosial memerlukan kerja keras yang berkelanjutan dan tidak dapat dianggap sebagai proses yang linier.

Keberhasilan rekonstruksi modal sosial dalam konteks Ambon juga tidak dapat dilepaskan dari dimensi simbolik yang kuat. Upacara-upacara rekonsiliasi, ritual-ritual keagamaan bersama, dan perayaan-perayaan kolektif berfungsi sebagai momen-momen dimana modal sosial yang baru dapat dikukuhkan dan dilegitimasi. Bourdieu menekankan bahwa modal simbolik memiliki kekuatan untuk mentransformasi hubungan sosial, dan hal ini tercermin dalam bagaimana berbagai simbol perdamaian di Ambon secara bertahap mengubah cara masyarakat memahami identitas kolektif mereka. Negara, dalam hal ini, tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dalam proses pembentukan makna kolektif yang baru.

Transformasi modal sosial dalam rekonstruksi hubungan negara-*civil society* di Ambon menunjukkan bahwa pembangunan perdamaian bukan hanya soal menghentikan kekerasan, tetapi juga tentang membangun kembali fondasi-fondasi sosial yang memungkinkan kehidupan bersama yang harmonis. Proses ini memerlukan komitmen jangka panjang dari semua pihak, fleksibilitas dalam pendekatan, dan kesediaan untuk terus belajar dari pengalaman. Dalam konteks teoritis, kasus Ambon memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana modal sosial dapat direkonstruksi dalam situasi pasca konflik, dan bagaimana kolaborasi antara negara dan *civil society* dapat menjadi kunci dalam proses transformasi sosial yang berkelanjutan.

Narasi dan Konstruksi Memori Kolektif Pasca Konflik

Dalam kerangka teori transformasi konflik yang dikembangkan Lederach (1997), rekonsiliasi dipahami sebagai sebuah *social space* di mana kebenaran, keadilan, belas kasih, dan perdamaian bertemu. Dalam konteks Ambon, ruang sosial ini menjadi arena di mana narasi-narasi tentang konflik dan visi perdamaian dikonstruksi dan diperebutkan. Lederach menekankan bahwa rekonsiliasi berkelanjutan memerlukan proses penyembuhan kolektif yang melibatkan pengakuan terhadap masa lalu sambil membangun visi bersama tentang masa depan.

Pemaknaan narasi damai ini pada masa awal rekonsiliasi memiliki kontradiksi makna antara negara dan *civil society*. Kesenjangan narasi pada masa awal rekonsiliasi tersebut mengakibatkan proses perdamaian berjalan lambat. Iskandar Slamet, mantan kombatan perang anak Muslim yang kini aktif menyuarakan perdamaian di

Ambon berpandangan bahwa: “Rekonsiliasi di Ambon tidak bisa hanya soal melupakan masa lalu dan bergerak maju. Kami perlu mengakui apa yang terjadi, memahami mengapa itu terjadi, dan bersama-sama memutuskan bagaimana membangun masa depan yang berbeda.”

Sementara itu, dalam pengertian Bourdieu (1990), arena adalah ruang sosial di mana aktor-aktor berkompetisi untuk mendapatkan posisi menggunakan berbagai bentuk modal yang mereka miliki. Dalam konteks Ambon, negara dengan modal ekonomi (anggaran) dan simbolik (legitimasi formal) yang besar, memiliki kapasitas dominan untuk mendefinisikan narasi resmi tentang konflik dan rekonsiliasi. Narasinya cenderung menekankan harmoni nasional, stabilitas, dan *moving forward* dengan mengaburkan aspek-aspek struktural dan identitas dari konflik.

Pemerintah pusat dari awal menghindari membicarakan dimensi agama dari konflik dan lebih fokus pada narasi provokator dan ancaman disintegrasi bangsa. Di sisi lain, kelompok *civil society* lebih menekankan urgensi simbolik tradisional, seperti redefinisi tradisi *Pela-Gandong* sebagai modal utama dalam menjembatani keragaman identitas masyarakat di Ambon.

Menggunakan kerangka Lederach tentang *multiple actors and levels*, dinamika rekonsiliasi di Ambon menunjukkan bagaimana aktor-aktor di berbagai level, dari pemerintah pusat hingga komunitas lokal, memiliki pendekatan berbeda dalam membangun narasi pasca konflik. Lederach menekankan pentingnya keterlibatan aktor di level menengah (*middle-range leaders*) seperti tokoh agama, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam menjembatani kesenjangan antara elit politik dan *grassroot*. Lembaga seperti Lembaga Antar Iman Maluku (LAIM) mengembangkan narasi rekonsiliasi berbasis dialog antariman yang mengakui dimensi keagamaan konflik sembari mempromosikan nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam tradisi keagamaan. Akademisi sekaligus direktur LAIM, Abidin Wakano memaparkan: “Kami tidak bisa hanya mengandalkan narasi perdamaian dari Jakarta. Rekonsiliasi harus mengakar pada realitas sosial dan budaya Maluku. *Pela-Gandong* dan nilai-nilai lokal lainnya menjadi fondasi narasi perdamaian yang mereka kembangkan.”

Konsep habitus dari Bourdieu memahami bagaimana pengalaman konflik membentuk disposisi dan cara pandang kolektif masyarakat Ambon. Habitus menurut Bourdieu adalah sistem disposisi yang bertahan lama dan dapat dialihkan, yang dihasilkan oleh pengalaman kolektif dan individual. Segregasi spasial selama dan pasca konflik membentuk habitus masyarakat Ambon yang berbasis trauma dan mempengaruhi cara mereka menafsirkan peristiwa sosial. Segregasi pemukiman menciptakan apa yang disebut Bourdieu sebagai *disjuncture* dalam habitus, di mana narasi tentang “yang lain” dikonstruksi dalam isolasi relatif dan sering berbasis pada stereotip dan kecurigaan. IL, pemuda Baturerah, mengakui dilema narasi yang dibangun dalam membentuk perspektif anak muda di Ambon: “Hampir dua dekade setelah konflik, kisah-kisah tentang kekejaman kelompok lain masih diceritakan dari generasi ke generasi di dalam komunitas kami. Narasi ini membentuk

cara anak muda melihat kelompok lain meski mereka tidak mengalami konflik secara langsung.”

Dalam pandangan Lederach, rekonsiliasi memerlukan pendekatan yang berfokus pada transformasi hubungan dari pola konfliktual menuju kooperatif. Pendekatan ini terlihat dalam berbagai inisiatif *memory work* yang dikembangkan organisasi *civil society* di Ambon, seperti Gerakan Bakubae dan program Live-in pemuda lintas agama. Inisiatif gerakan ini tidak hanya memungkinkan pertukaran narasi dan pengalaman antar komunitas, tetapi juga menciptakan ruang untuk konstruksi narasi baru yang transformatif (Tidore, 2022). Dalam kerangka Bourdieu, inisiatif semacam ini dapat dipahami sebagai strategi untuk mengakumulasi modal simbolik alternatif yang menantang narasi dominan yang dipromosikan negara. Abidin Wakano sebagai salah satu penggagas Gerakan Bakubau mengungkapkan: “Gerakan Bakubae memberikan ruang bagi narasi-narasi kecil yang tidak terakomodasi dalam wacana resmi. Di sini, korban dari kedua komunitas dapat berbagi pengalaman dan membangun solidaritas baru.”

Lederach menekankan dimensi temporal dalam rekonsiliasi, di mana proses ini melibatkan reorientasi hubungan dengan masa lalu, pemulihan di masa kini, dan visi bersama tentang masa depan. Kontestasi narasi di Ambon mencerminkan perbedaan penekanan temporal ini. Negara, dengan pendekatan stabilitas dan pembangunan, cenderung berorientasi pada masa depan dengan meminimalkan eksplorasi masa lalu yang dianggap dapat membuka luka lama. Sebaliknya, kalangan *civil society* menekankan pentingnya menghadapi masa lalu sebagai prasyarat rekonsiliasi autentik. Kontestasi temporal ini, dalam kerangka Bourdieu, mencerminkan pertarungan untuk mendefinisikan *doxa* atau pemahaman yang diterima secara luas tentang bagaimana masa lalu seharusnya diingat dan diposisikan dalam narasi kolektif.

Dikotomi narasi juga terjadi dalam ruang media dan produksi budaya. Bourdieu memahami media sebagai arena di mana kapital simbolik diproduksi dan disirkulasikan. Lestasi (2020) menganalisis bagaimana instrumen seni seperti musik berperan dalam dinamika rekonsiliasi pasca-konflik di Ambon, khususnya melalui kolaborasi lintas agama yang menciptakan harmoni sosial baru. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi antara musik hadroh dari komunitas Muslim dan musik trompet dari komunitas Kristen di Kota Ambon memiliki kekuatan untuk menjaga perdamaian dalam masyarakat yang pluralistik. Instrumen musik tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekspresi budaya, tetapi juga sebagai jembatan penghubung antarkelompok yang sebelumnya berkonflik, menciptakan identitas kolektif baru yang menempatkan perdamaian sebagai nilai bersama dalam masyarakat Ambon pascakonflik. Dalam kerangka Lederach, seni dan media merupakan sumber daya penting untuk *moral imagination* yang memungkinkan masyarakat membayangkan hubungan baru yang melampaui polarisasi konfliktual. Film dokumenter seperti “Cahaya dari Timur: Beta Maluku” dan inisiatif seperti “Paparisa Ambon Bergerak” menawarkan narasi yang lebih beragam tentang konflik dan rekonsiliasi.

Memasuki dekade kedua pasca konflik (2012-2022), terlihat perkembangan penting dalam bentuk hibridisasi narasi yang menggabungkan elemen dari berbagai perspektif yang sebelumnya berkontestasi. Fenomena ini selaras dengan konsep Lederach tentang pembangunan perdamaian sebagai perubahan sosial yang mengakui bahwa rekonsiliasi bukanlah titik akhir tetapi proses berkelanjutan yang melibatkan adaptasi dan evolusi berbagai narasi. Dalam kerangka Bourdieu, hibridisasi ini dapat dipahami sebagai hasil dari kontestasi berkepanjangan di mana berbagai aktor mengembangkan strategi adaptif dan mengakomodasi elemen dari narasi yang berbeda untuk memperkuat posisi mereka.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan media sosial dalam dekade terakhir telah memberikan dimensi baru dalam kontestasi narasi ini. Platform digital memungkinkan aktor-aktor *civil society* yang sebelumnya terpinggirkan untuk memproduksi dan menyebarkan narasi alternatif tentang konflik dan rekonsiliasi, menantang monopoli negara atas produksi sejarah resmi. Film dokumenter independen, blog, dan kampanye media sosial telah menjadi medium bagi generasi muda Ambon untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan pemahaman mereka tentang konflik yang tidak pernah mereka alami secara langsung. Fenomena ini sejalan dengan argumen Visoka (2018) tentang demokratisasi wacana perdamaian melalui teknologi digital. Namun, kontestasi digital ini juga dapat memperkuat polarisasi memori kolektif jika tidak disertai dengan upaya dialog dan pemahaman lintas komunitas.

Analisis ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi pasca konflik bukan sekadar proses teknis penyelesaian masalah, melainkan arena kontestasi diskursif di mana berbagai aktor berupaya mendefinisikan dan mengkonstruksi makna perdamaian. Mengikuti pemikiran Bourdieu, pertarungan narasi ini pada dasarnya adalah kontestasi untuk mendefinisikan *symbolic order* dalam masyarakat pasca konflik, siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan bagaimana konflik diingat dan bagaimana perdamaian dibayangkan. Bagi Lederach, negosiasi narasi dan memori kolektif merupakan aspek penting dari transformasi relasional dan kultural yang diperlukan untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan.

Negosiasi Berkelanjutan dan Konsolidasi Perdamaian: Evaluasi Transformasi Jangka Panjang

Transformasi perdamaian jangka panjang dalam konteks pasca konflik Ambon memerlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana proses negosiasi berkelanjutan telah membentuk landasan bagi konsolidasi perdamaian yang substansial. Kerangka kerja Lederach tentang transformasi konflik menawarkan lensa analitis yang komprehensif untuk mengevaluasi sejauh mana upaya rekonsiliasi di Ambon telah menghasilkan perubahan yang bermakna pada tiga dimensi fundamental: struktural, relasional, dan kultural. Evaluasi ini menjadi krusial mengingat kompleksitas konflik kemanusiaan yang terjadi di Ambon antara tahun 1999-2002, yang tidak hanya melibatkan dimensi agama tetapi juga aspek politik, ekonomi, dan sosial yang saling berjaln. Pemahaman tentang transformasi jangka panjang ini

memungkinkan kita untuk mengidentifikasi capaian-capaian signifikan sekaligus tantangan-tantangan yang masih perlu diatasi dalam proses pembangunan perdamaian yang berkelanjutan.

Dimensi transformasi struktural dalam konteks Ambon dapat dilihat dari perubahan fundamental dalam institusi-institusi formal dan informal yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Dalam dua dekade pasca konflik, telah terjadi restrukturisasi signifikan dalam tata kelola pemerintahan daerah, sistem keamanan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Implementasi otonomi daerah yang lebih luas telah memberikan ruang bagi komunitas lokal untuk mengembangkan pendekatan penyelesaian konflik yang lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika lokal. Perubahan struktural ini juga tercermin dalam pembentukan lembaga-lembaga baru yang berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa antarkelompok. Transformasi struktural ini menunjukkan adanya evolusi dari pendekatan *top-down* yang dominan pada masa konflik menuju model tata kelola yang lebih partisipatif dan inklusif.

Namun demikian, evaluasi terhadap transformasi struktural juga mengungkap adanya keterbatasan dan tantangan yang masih perlu diatasi. Meskipun berbagai institusi formal telah dibentuk, efektivitas operasional lembaga-lembaga ini dalam menangani konflik-konflik berskala kecil masih menghadapi hambatan birokratis dan keterbatasan kapasitas. Struktur ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari dampak konflik juga menjadi tantangan tersendiri, di mana ketimpangan ekonomi antarkelompok masih berpotensi menjadi sumber ketegangan. Selain itu, integrasi antara institusi formal dan sistem adat tradisional masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut untuk memastikan bahwa mekanisme penyelesaian konflik dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan. Relasi negara dan *civil society* yang sempat tegang diawal diakui mengakibatkan proses rekonsiliasi tidak seimbang, namun seiring waktu kedua unsur tersebut mampu saling melengkapi peranan masing-masing.

Keberhasilan transformasi relasional juga dapat dilihat dari munculnya generasi muda yang tidak secara langsung mengalami trauma konflik dan memiliki perspektif yang lebih terbuka terhadap keragaman. Program-program pertukaran pelajar, kegiatan olahraga bersama, dan festival budaya multikultural telah menjadi wadah bagi generasi muda untuk membangun relasi yang tidak dibebani oleh prasangka dan ketakutan masa lalu. Namun, proses transformasi relasional ini masih menghadapi tantangan dari adanya memori kolektif yang traumatis dan stigma sosial yang masih bertahan di sebagian kelompok masyarakat. Upaya rekonsiliasi pada level relasional memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap trauma historis sambil tetap mendorong terciptanya ruang-ruang interaksi yang aman dan konstruktif.

Dimensi transformasi kultural menunjukkan perubahan yang paling mendalam namun sekaligus paling sulit untuk diukur secara kuantitatif. Dalam konteks Ambon, transformasi kultural termanifestasi dalam evolusi narasi-narasi dominan tentang identitas, sejarah, dan visi masa depan bersama. Narasi-narasi yang sebe-

lumnya bersifat eksklusif dan antagonistik secara bertahap mulai digantikan oleh narasi-narasi yang lebih inklusif dan menekankan pada nilai-nilai kebersamaan sebagai sesama anak negeri. Proses ini didukung oleh revitalisasi nilai-nilai budaya lokal seperti konsep *Pela-Gandong* yang menekankan pada persaudaraan lintas agama dan etnis. Transformasi kultural ini juga tercermin dalam perubahan bahasa dan simbologi yang digunakan dalam diskursus publik, di mana terminologi-terminologi yang berpotensi memicu konflik mulai dihindari dan digantikan dengan bahasa yang lebih netral dan inklusif.

Evaluasi terhadap efektivitas negosiasi berkelanjutan dalam mendukung transformasi perdamaian menunjukkan bahwa pendekatan multi-level telah memberikan kontribusi yang signifikan. Level atas yang melibatkan aktor-aktor pemerintah telah berhasil menciptakan kerangka kebijakan yang mendukung perdamaian, sementara level menengah yang melibatkan organisasi *civil society* telah memfasilitasi dialog-dialog informal yang lebih fleksibel dan inovatif. Level bawah yang melibatkan aktor-aktor *grassroots* telah memastikan bahwa proses perdamaian benar-benar mengakar pada level komunitas. Integrasi ketiga level ini telah menciptakan sistem negosiasi yang tangguh dan adaptif terhadap berbagai tantangan yang muncul dalam proses transformasi perdamaian.

Meskipun situasi di Ambon telah menunjukkan tren keamanan yang terus membaik, namun negosiasi pembangunan perdamaian berkelanjutan masih dibutuhkan. Merunut teori perdamaian jangka panjang yang ditawarkan Lederach, situasi di Ambon hanya akan langgeng jika ketiga level aktor mampu menjaga relasi jangka panjang, tidak saja berakhir pada momentum tertentu. Hal ini dibenarkan oleh Abidin Wakano, menurutnya masih banyak pekerjaan rumah bagi aktivis perdamaian di Ambon terutama persoalan segregasi spasial dan isu-isu keagamaan.

Tantangan-tantangan yang masih dihadapi dalam proses konsolidasi perdamaian mencakup aspek-aspek yang bersifat internal maupun eksternal. Dari sisi internal, masih terdapat kelompok-kelompok kecil yang resisten terhadap perubahan dan berupaya mempertahankan status quo yang menguntungkan posisi mereka. Fragmentasi dalam *civil society* juga kadang-kadang menghambat koordinasi yang efektif dalam implementasi program-program perdamaian. Dari sisi eksternal, dinamika politik nasional dan regional yang tidak selalu kondusif dapat memberikan dampak negatif terhadap stabilitas perdamaian di Ambon. Isu-isu seperti pilihan politik, alokasi sumber daya, dan kebijakan pembangunan nasional dapat menjadi sumber ketegangan baru jika tidak dikelola dengan bijaksana.

Implikasi dari evaluasi ini terhadap teori dan praktik *peacebuilding* menunjukkan bahwa model transformasi konflik Lederach dapat diaplikasikan secara efektif dalam konteks konflik kemanusiaan yang kompleks seperti yang terjadi di Ambon. Namun, aplikasi model ini memerlukan adaptasi yang mempertimbangkan karakteristik lokal, dinamika kultural, dan konteks historis yang spesifik. Pengalaman Ambon juga menunjukkan pentingnya membangun kapasitas lokal untuk perdamaian, di mana aktor-aktor lokal tidak hanya menjadi penerima intervensi perdamaian

tetapi juga menjadi agen aktif dalam merancang dan mengimplementasikan strategi transformasi konflik.

Model Hibridisasi Pela-Gandong dan Demokrasi Deliberatif dalam Pembangunan Perdamaian Kontemporer

Transformasi keterlibatan sipil dalam pembangunan perdamaian di Ambon menghadirkan fenomena unik berupa hibridisasi antara sistem tradisional *Pela-Gandong* dengan mekanisme demokrasi deliberatif modern. *Pela-Gandong* merupakan ikatan persatuan yang secara resmi menamai satu sama lain sebagai saudara, sementara setiap suku di Maluku sangat menghargai *Pela-Gandong* sebagai proses penyelesaian konflik tradisional yang berhasil mengakhiri konflik kekerasan pada tahun 1999. Hibridisasi ini menciptakan model partisipasi sipil yang tidak hanya mengandalkan mekanisme formal negara, tetapi juga mengaktivasi modal sosial tradisional yang telah teruji dalam mengelola konflik antarkelompok. Proses ini menunjukkan bagaimana *civil society* di Ambon tidak sekadar mengadopsi model demokrasi deliberatif Barat, tetapi mengadaptasinya dengan kearifan lokal yang sudah mengakar dalam struktur sosial masyarakat.

Mekanisme *Pela-Gandong* dalam konteks rekonsiliasi pasca-konflik mengalami transformasi signifikan dari sistem persaudaraan adat menjadi platform deliberasi publik yang inklusif. *Pela-Gandong* sebagai kearifan lokal memiliki peran penting dalam proses rekonsiliasi untuk mengkapitalisasi kembali modal sosial yang retak selama konflik. Dalam wawancara dengan tokoh perdamaian Ambon, Abidin Wakano, menjelaskan bahwa *Pela-Gandong* bukan hanya soal ritual atau upacara, tapi cara untuk berbicara, bermusyawarah, dan mengambil keputusan bersama. Setelah konflik, masyarakat harus belajar bagaimana membuka ruang *Pela-Gandong* untuk semua orang, tidak hanya yang punya hubungan darah atau sejarah. Transformasi ini menunjukkan bagaimana institusi tradisional dapat menjadi wadah demokratis yang lebih luas, di mana prinsip-prinsip deliberatif seperti dialog terbuka, argumentasi rasional, dan konsensus dapat dipraktikkan dalam kerangka budaya lokal.

Proses hibridisasi ini menghasilkan model partisipasi sipil yang disebutkan sebagai “deliberasi berbasis pela” (*pela-based deliberation*), di mana mekanisme pengambilan keputusan tidak hanya mengikuti prosedur formal demokrasi modern tetapi juga menghormati protokol adat dan nilai-nilai nenek moyang. Budaya persaudaraan antara kelompok masyarakat dan desa dalam sistem *Pela-Gandong* menjadi inspirasi bagi perdamaian, dengan banyak kelompok di Maluku membentuk hubungan persaudaraan antar desa tanpa memandang latar belakang agama. Oca, seorang aktivis perempuan dari LSM lokal, menggambarkan pengalamannya dalam pertemuan-pertemuan rekonsiliasi yang selalu dimulai dengan ritual *pela*, baru kemudian diskusi dengan metode yang lebih modern. Hal ini membuat orang-orang merasa aman dan dihargai identitasnya. Model ini mencerminkan pendekatan sintetis dalam pembangunan perdamaian yang menggabungkan legitimasi tradisional dengan efektivitas prosedural modern.

Civil society di Ambon berperan sebagai perantara budaya yang menerjemahkan antara logika *Pela-Gandong* dan kebutuhan demokrasi deliberatif dalam konteks rekonsiliasi. Berbagai mekanisme dan inisiatif membantu mendefinisikan peran kelompok *civil society* dalam proses perdamaian. Organisasi-organisasi *civil society* mengembangkan metodologi yang disebut “*circles of pela*”, forum-forum diskusi yang mengadaptasi struktur *Pela-Gandong* untuk membahas isu-isu publik kontemporer. Dalam forum ini, setiap peserta dianggap memiliki ikatan *pela* sementara yang memberikan hak dan kewajiban untuk mendengarkan, berbicara, dan berkontribusi dalam pencarian solusi.

Implementasi model hibrida ini menghadapi tantangan dalam mengelola ketegangan antara inklusivitas deliberatif dan eksklusivitas tradisional *Pela-Gandong*. Penduduk Ambon sangat memegang teguh teori *Pela-Gandong*, di mana desa-desa dengan persuasi agama yang berbeda terikat darah untuk saling membantu. Meskipun *Pela-Gandong* secara historis menciptakan ikatan yang kuat antarkelompok, sistem ini juga memiliki batas-batas yang dapat mengecualikan kelompok tertentu, terutama pendatang atau komunitas yang tidak memiliki geneologi *pela*. *Civil society* harus mengembangkan mekanisme adaptasi *pela* yang memungkinkan partisipasi kelompok-kelompok baru dalam proses deliberasi tanpa menghilangkan makna sakral dari sistem tradisional. Transformasi ini menunjukkan adaptabilitas kearifan lokal dalam menghadapi realitas sosial yang berubah akibat migrasi, urbanisasi, dan modernisasi.

Efektivitas model hibridisasi *Pela-Gandong* dan demokrasi deliberatif dapat dilihat dari kemampuannya menciptakan jembatan legitimasi antara otoritas tradisional dan otoritas modern dalam proses pembangunan perdamaian. Penguatan demokrasi meningkatkan partisipasi sipil yang melampaui pemilu menangkan-kalah, termasuk demokrasi partisipatif dan pengambilan keputusan kolektif. Forum-forum deliberatif yang menggunakan kerangka *Pela-Gandong* berhasil menciptakan ruang di mana keputusan yang diambil memiliki legitimasi ganda: secara prosedural demokratis dan secara kultural dapat diterima. Hal ini terlihat dalam berbagai program rekonsiliasi komunitas, pembangunan ekonomi bersama, dan pengelolaan konflik mikro yang berhasil mencegah eskalasi menjadi konflik terbuka.

Aspek transformatif dari model hibridisasi ini terletak pada kemampuannya mengubah pemahaman tentang kewarganegaraan dan keterlibatan sipil dalam konteks masyarakat pasca-konflik. Model ini tidak hanya mengintegrasikan tradisi dan modernitas, tetapi menciptakan bentuk kewarganegaraan yang berakar dalam dan kultural yang autentik sambil tetap inklusif dan progresif. Tujuan utama praktik demokrasi deliberatif adalah meningkatkan partisipasi warga, hasil yang lebih baik, dan masyarakat yang lebih autentik demokratis. Proses ini menghasilkan apa yang dapat disebut sebagai kosmopolitanisme yang berakar, di mana identitas lokal yang kuat justru menjadi basis untuk keterbukaan dan dialog dengan kelompok lain. *Civil society* di Ambon berhasil menunjukkan bahwa partisipasi sipil yang efektif tidak harus mengikuti templat universal, tetapi dapat dikembangkan melalui

adaptasi kreatif yang menghormati konteks budaya lokal sambil memenuhi standar demokratis modern.

Model hibridisasi *Pela-Gandong* dan demokrasi deliberatif dalam pembangunan perdamaian di Ambon memberikan kontribusi teoretis penting bagi literatur pembangunan perdamaian dengan menunjukkan bahwa *transformative peacebuilding* tidak hanya terjadi melalui perubahan struktural atau institusional, tetapi juga melalui sintesis kreatif antara modal sosial tradisional dan mekanisme partisipasi modern. Demokrasi deliberatif tidak berusaha menggantikan demokrasi tradisional, tetapi berusaha meningkatkan dan menginformasikan praktik demokratis yang sudah ada. Keberhasilan model ini dalam menciptakan stabilitas sosial dan mencegah rekurensi konflik di Ambon menunjukkan bahwa pembangunan perdamaian yang berkelanjutan memerlukan pendekatan yang tidak hanya tepat secara teknis tetapi juga berbasis budaya. Hal ini mengimplikasikan perlunya pengembangan teori pembangunan perdamaian yang lebih sensitif terhadap konteks budaya dan kemampuan adaptif masyarakat lokal dalam mengintegrasikan nilai-nilai universal dengan kearifan tradisional.

Pengalaman Ambon menunjukkan bahwa transformasi keterlibatan sipil dalam pembangunan perdamaian tidak harus mengikuti dikotomi antara tradisional versus modern, tetapi dapat mengembangkan “*third way*” yang menggabungkan kekuatan keduanya. Model hibridisasi *Pela-Gandong* dan demokrasi deliberatif menciptakan ruang partisipasi yang berlegitimasi, inklusif, dan efektif, di mana warga dapat terlibat dalam proses pembangunan perdamaian dengan cara yang menghormati identitas budaya mereka sambil tetap memenuhi standar demokratis kontemporer. Keberhasilan model ini memberikan inspirasi bagi masyarakat pasca-konflik lainnya untuk mengeksplorasi kemungkinan sintesis kreatif antara tradisi lokal dan praktik demokratis modern dalam upaya membangun perdamaian yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa proses rekonsiliasi di Ambon tidak berlangsung linier, melainkan ditandai oleh tarik-menarik kepentingan antara aktor negara dan *civil society*. Negara cenderung menggunakan pendekatan *top-down* yang menekankan stabilitas dan keamanan, sementara *civil society* mengembangkan inisiatif *bottom-up* yang berfokus pada dialog antarkelompok, pemulihan trauma, dan penguatan kohesi sosial. Kedua pendekatan ini sering kali berjalan paralel dengan ketegangan yang mewarnai relasinya. Modal yang dimiliki negara (terutama modal ekonomi dan politik) seringkali mendominasi proses rekonsiliasi formal, sementara *civil society* mengandalkan modal sosial dan kultural dalam menciptakan ruang-ruang perdamaian informal di tingkat akar rumput. Konsep dari Bourdieu membantu menjelaskan bagaimana berbagai jenis modal ini dipertaruhkan dalam arena rekonsiliasi dan mempengaruhi habitus masyarakat Ambon dalam membangun perdamaian.

Temuan penting lainnya adalah transformasi dalam relasi negara dan *civil society* selama periode 20 tahun. Meskipun awalnya lebih adversarial, seiring waktu terjadi kolaborasi yang lebih konstruktif meskipun tidak sepenuhnya bebas dari ketegangan. Beberapa inisiatif perdamaian lokal yang awalnya dikembangkan *civil society* akhirnya diadopsi ke dalam kebijakan pemerintah, menunjukkan adanya proses pembelajaran dan adaptasi mutual. Dengan demikian pembangunan perdamaian yang berkelanjutan di Ambon memerlukan pengakuan terhadap kompleksitas dinamika kekuasaan ini, dan pentingnya menciptakan keseimbangan antara peran negara dan *civil society*. Pendekatan yang lebih integratif, yang mengakui kekhasan konteks lokal dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat secara inklusif, diperlukan untuk menjaga perdamaian jangka panjang di wilayah pasca konflik seperti Ambon.

Kontribusi Penulis

Fadly Fahry S. Wally: *Writing – original draft, Conceptualization, Investigation.*

Meidi Kosandi: *Writing – review & editing, Supervision, Validation.*

Pernyataan Keaslian

Dengan ini kami menyatakan bahwa artikel ini merupakan karya asli yang telah terbebas dari plagiarisme dan semua referensi yang digunakan telah dicantumkan dalam artikel, serta artikel ini belum pernah dipublikasikan atau sedang dikirimkan kepada jurnal lainnya.

Biografi

Fadly Fahry S. Wally merupakan mahasiswa pascasarjana Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Di luar lingkup akademis, aktif sebagai penulis puisi yang sudah menerbitkan belasan buku antologi.

Meidi Kosandi merupakan akademisi Departemen Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Beberapa karya yang telah dipublikasikan di antaranya: Strategi Modal Sosial Calon Legislatif Terpilih Partai Adil Sejahtera Aceh pada Pemilihan Legislatif 2024 (2025); Penggunaan Strategi Politik Identitas dan Marketing Politik Dadang-Sahrul dalam Menggulingkan Dinasti Politik di Kabupaten Bandung (2024); Politik Dinasti dalam Seleksi Kandidat Calon Anggota Legislatif: Studi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPRD DKI Jakarta Pada Pemilu 2024 (2024).

Referensi

- Alici, N. (2024). Learning from civil society actors in Turkey: Using transitional justice in an ongoing conflict. *The International Journal of Transitional Justice*, 18(2), 250-266. <https://doi.org/10.1093/ijtj/ijae015>
- Arslan, A., Kamara, S., Golgeci, I., & Tarba, S. Y. (2022). Civil society organisations' management dynamics and social value creation in the post-conflict volatile contexts pre and during COVID-19. *International Journal of Organizational Analysis*, 30(7), 20-33. <https://doi.org/10.1108/IJOA-01-2021-2573>
- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge University Press.
- Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Harvard University Press.
- Bourdieu, P. (1991). *Language and Symbolic Power*. Harvard University Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications.
- Fiedler, C. (2023). What Do We Know about How Armed Conflict Affects Social Cohesion? A Review of the Empirical Literature. *International Studies Review*, 25(3), 1-34. <https://doi.org/10.1093/isr/viad030>
- Lederach, J. P. (1997). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. United States Institute of Peace Press.
- Lederach, J. P. (2005). *The Moral Imagination: The Art and Soul of Building Peace*. Oxford University Press.
- Lederach, J. P. (2014). *The Little Book of Conflict Transformation*. Good Books.
- Lestari, D. T. (2020). Merawat Harmoni Agama melalui Kolaborasi Musik Hadroh dan Trompet di Ambon. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 4(3), 215-226. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v4i3.8880>
- Natil, I. (2021). *Conflict, Civil Society, and Women's Empowerment: Insights from the West Bank and the Gaza Strip*. Emerald Publishing Limited.
- Nilsson, M. (2018). Civil society actors in peace negotiations in Central America. *Journal of Civil Society*, 14(2), 135-152. <https://doi.org/10.1080/17448689.2018.1484004>
- Paffenholz, T. (2014). International peacebuilding goes local: analysing Lederach's conflict transformation theory and its ambivalent encounter with 20 years of practice. *Peacebuilding*, 2(1), 11-27. <https://doi.org/10.1080/21647259.2013.783257>
- Parto, S. (2018). *Civil society–state relations in peace and conflict*. McGill Centre for Human Rights & Legal Pluralism. McGill University. <https://www.mcgill.ca/humanrights/article/70th-anniversary-universal-declaration-human-rights/civil-society-state-relations-peace-and-conflict>
- Shnabel, N., & Ullrich, J. (2017). *Confronting History and Reconciliation: A Review of Civil Society's Approaches to Transforming Conflict Narratives*. In *Intergroup Contact Theory* (pp. 45-62). Springer.

- Sihite, G. M., Malik, I., KY, I. G. S., & Widodo, P. (2023). Peran Organisasi Masyarakat Sipil/Civil Society Organization (Cso) Dalam Menyelesaikan Konflik Agraria Di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(11), 5232-5244.
- Tidore, B. (2022). Resolusi Konflik Berbasis Teologi Baku Bae Ambon (1999-2002). *Media: Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 3(2), 212-235.
<https://doi.org/10.53396/media.v3i2.111>
- Trihartono, A., & Viartasiwi, N. (2015). Engaging the quiet mission: Civil society in breaking the cycle of violence in the post-conflict Poso, Indonesia. *Procedia Environmental Sciences*, 28, 115-123.
<https://doi.org/10.1016/j.proenv.2015.07.017>
- van Munster, M., & van Wijk, J. (2025). Angola's Reconciliation Commission CIVICOP: Delayed Transitional Justice in a Non-Transitional Authoritarian Context. *The International Journal of Transitional Justice*, ijafo07, 1-18.
<https://doi.org/10.1093/ijtj/ijafo07>
- Visoka, G. (2018). Agents of peace: Place, Identity and Peacebuilding. In *The politics of identity: Place, space and discourse* (pp. 71-88). Manchester University Press.